



Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

PENUNDAAN KONVERSI ELPIJI KE KOMPOR LISTRIK

Lisnawati

Analisis Legislatif Ahli Muda
lisnawati@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (23/9/2022), memastikan program konversi dari elpiji ke kompor listrik induksi tidak akan dilakukan tahun ini. Sebab, sampai saat ini belum ada pembahasan anggaran terkait pelaksanaan program tersebut.

Wacana konversi ini muncul akibat adanya *oversupply* produksi listrik yang membebani keuangan perusahaan. Hingga akhir tahun ini diperkirakan kelebihan pasokan listrik mencapai 6 Giga Watt (GW). Ancaman kelebihan pasokan ini akan terjadi di Pulau Jawa, penambahan *demand* listrik yang hanya 800 Mega Watt (MW) tidak sebanding dengan *supply* yang akan masuk mencapai 6.800 MW. Hal ini juga akan terjadi di Pulau Sumatera, penambahan *demand* listrik selama tiga tahun mendatang hanya sekitar 1,5GW, sedangkan kapasitas dalam *pipeline* 5MW.

Meskipun pelaksanaannya ditunda namun uji coba konversi ini sedang dilakukan di berbagai kota. Direktur Utama PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) menyatakan bahwa program konversi kompor elpiji ke kompor listrik akan terjadi penghematan biaya sebesar Rp8.000 per kilogram elpiji. Masyarakat akan dapat menghemat 10-15% dibandingkan dengan kompor elpiji. Selain itu kebijakan ini akan menghemat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara hingga Rp330 miliar per tahunnya.

Direktur *Center Economics and Law Studies* (Celios), Bhima Yudhistira menilai ada tujuan lain dari pemerintah dalam program migrasi penggunaan kompor listrik dari kompos gas. Salah satunya untuk mengurangi ketergantungan negara terhadap bahan bakar fosil. Migrasi ini tentu hanya akan memindahkan beban penggunaan energi yang tadinya di hilir menjadi di hulu, mengingat hulu pembangkit listrik masih menggunakan batu bara untuk menghasilkan energi listrik.

Senada dengan Bhima Yudhistira, Ketua Komisi VII mempertanyakan urgensi migrasi ini. Ketua Komisi VII menilai program ini akan merugikan masyarakat miskin karena bebannya bertambah. Mereka yang selama ini menikmati subsidi dari gas elpiji harus beralih ke kompor listrik dengan menaikkan daya.

Ekonom *Political Economy and Policy Studies* (PEPS) Anthony Budiawan menilai cara ini memang sangat efektif menurunkan konsumsi gas elpiji. Apalagi pemerintah membagikan kompor listriknya secara cuma-cuma. Namun dari sisi infrastruktur masyarakat belum siap sepenuhnya. Mengingat daya listrik yang digunakan rumah tangga masih lebih besar di kelompok 1.300 VA ke bawah. Tagihan listrik masyarakat dapat bertambah seiring dengan penggunaan kompor listrik.

Pro kontra kebijakan selalu terjadi apabila akan diimplementasikan. Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Rida Mulyana menyatakan bahwa pemerintah telah siap untuk membagikan paket kompor listrik dengan kisaran harga Rp. 1,8 juta. Ini dalam bentuk paket dilengkapi dengan dua tungku, alat masak dan *miniature circuit breaker* (MCB). Kota Solo menjadi salah satu area dari uji coba konversi dengan memberikan 2.000 unit kompor listrik gratis. Pemerintah akan memantau, menerima seluruh masukan dari masyarakat dan melihat langsung kondisi di lapangan. Pemerintah akan menghitung dengan cermat segala biaya dan risiko memperhatikan kepentingan masyarakat serta menyosialisasikan kepada masyarakat sebelum program diberlakukan.

Atensi DPR

Meskipun pemerintah telah menegaskan bahwa kebijakan ini akan ditunda untuk tahun ini, namun banyak hal yang harus dilakukan pemerintah sebelum memberlakukan konversi ini. Pemerintah harus menetapkan siapa sasaran dari kebijakan ini. Apabila tujuan dari implementasi ini untuk menurunkan subsidi energi yang saat ini telah mencapai Rp149,4 triliun, maka harus dipastikan penerima subsidi kompor listrik adalah orang yang tepat. Pemerintah juga harus memastikan secara kuantitatif bahwa konversi ini dapat menurunkan pengeluaran rumah tangga khususnya masyarakat miskin. Isu terkait kebutuhan kapasitas listrik yang cukup besar juga harus diselesaikan pemerintah, mengingat saat ini masih banyak rumah warga miskin berdaya 450 VA. Masalah klasik lain yang harus diselesaikan oleh pemerintah adalah terkait data. Data penerima kompor listrik gratis ini pun harus jelas, karena acap kali kurang tepat sasaran. DPR RI perlu mendorong pemerintah untuk segera menyelesaikan segala potensi masalah dan mengevaluasi uji coba yang telah diterapkan sebelum mengimplementasikan kebijakan ini.

Sumber

cnbcindonesia.com, 23 September 2022;
kompas.id, 23 September 2022;
regional.kompas.com, 22 September 2022.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>



@puslitbkd_official

EDITOR

Polhukam

Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

Ekkuinbang

Juli Panglima S
Sri Nurhayati Q.
Ari Muliarta G.
Rafika Sari
Ariesy Tri Mauleny

Kesra

Achmad Muchaddam F.
Yulia Indahri
Rahmi Yuningsih

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.

©PuslitBK2022